

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen “Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Menurut Suparlan (2008: 12), guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Namun, Suparlan (2008: 13) juga menambahkan bahwa secara legal formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar

Guru sebagai fasilitator yakni memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya kemudian memberikan toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran (Alma, 2009: 7).

Guru juga dapat disebut sebagai motifator karena mereka harus mampu memposisikan sebagai unsur penting dalam kehidupan peserta didik. Posisi guru harus mampu menjadi pemicu semangat belajar siswa. Guru harus senantiasa memberikan motivasi dorongan dan panutan bagi siswa dalam mencapai cita-cita. Upaya ini dapat dibantu dengan cara guru memberikan nasehat, dorongan dan bahkan teguran kepada siswa yang patah semangat. Guru juga harus mampu memberikan penjelasan positif tentang manfaatnya

belajar sebab hanya dengan belajar yang giat pengetahuan manusia dapat tumbuh dengan baik dengan baik (Manizar, 2015:16).

Guru harus mampu membuat siswa tertarik pada pelajaran. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Memang, proses pendidikan tanpa guru menghasilkan hasil yang kurang optimal. Setelah itu, proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan berkualitas dengan banyak pemangku kepentingan yang berbeda, terutama guru dan siswa, orang tua dan administrator pedagogis untuk dapat menciptakan efektivitas pengajaran yang tinggi. Salah satu peran guru tidak hanya sebagai petugas pengajar tetapi juga sebagai pendidik, dimana guru memberikan motivasi, pendidikan kepada siswa dari aspek nilai, etika dan sikap, hingga akhirnya membentuk kepribadian pendidikan siswa (Suprahatingrum, 2017). Di satu sisi, guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan peserta didik dan membangun kepribadian, nilai budaya dan etika, yang merupakan tanggung jawab mewujudkan tujuan pendidikan warga negara (Latifah, 2017:23).

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua ke dua dan mampu menarik simpati para siswa sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam mengajar. (Amiruddin, 2013:3).

Untuk menjalankan perannya, guru dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) membutuhkan kompetensi yang cukup untuk membentuk karakter peserta didik. Guru PPKn harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tepat. Untuk membentuk karakter siswa, guru harus mengembangkan keterampilan kepribadian (Dwintari, 2017:4).

Peran guru dalam PPKn harus mencakup beberapa kompetensi, seperti ketekunan dan kemampuan menjaga kepribadian seseorang tetap hidup (Bego, 2016:8). Selain itu, guru PPKn harus memiliki nilai-nilai moral di antara majemuknya nilai-nilai moral siswa. Peran guru PPKn harus

mengedepankan tiga aspek ilmu kewarganegaraan politik, hukum dan moral (Octavia & Sumanto, 2018:4). Berkaitan dengan moralitas guru sebagai panutan bagi siswa dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan perilaku disiplin lainnya.

Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (*Civics*) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (*Citizenship*). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa *Citizenship* sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan *Citizenship* dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (*civic community*) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4).

Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia “*Global Society*” (Ubaedillah, 2008: 6).

Misi PKn mencerdaskan kehidupan bangsa, demokratis dan berakhlak mulia, senantiasa mendukung dan mengembangkan cita-cita demokrasi, serta membangun karakter bangsa (Azmi, 2016). Sementara visi PKn adalah mewujudkan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan individu dan menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Azmi, 2016). PKn mempersiapkan warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Ruang lingkup pengembangan materi muatan PKn adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan

tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Menurut tanah air (Rachman dkk, 2021).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pendidikan karakter yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seperti budi pekerti dan norm (Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra, 2015). PPKn sebagai pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan warga memiliki berakhlak, berbudi pekerti luhur, bermoral dan taat kepada aturan agar nantinya anak memiliki kepribadian yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan karakter pada peserta didik berdasarkan Pancasila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki pengertian bahwa sebagai seorang warga yang baik harus memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku sebagaimana mestinya. Pencapaian pendidikan anak membutuhkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Orang tua tidak dapat sepenuhnya memaksakan proses pendidikan pada anak-anaknya di sekolah. Oleh karena itu, dalam mengasuh anak, hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan, dan anak dapat memperoleh perkembangan karakter yang kuat (Sihombing dkk, 2021).

Pembentukan karakter merupakan suatu tujuan utama pendidikan nasional, pada pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik supaya memiliki kecerdasan, kepribadian yang kuat serta akhlak mulia. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga kepribadian atau berkarakter, dengan harapan agar nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain, tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak atau mempunyai kepribadian (Kamisa, 1997:281). Selanjutnya dalam *Dorland's Pocket Medical Dictionary* (1986:126) dinyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata yang berbeda yang di tunjukkan oleh individu. Di dalam kamus

psikologi di nyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang ; biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat relatif tetap (Dali Gulo, 1982:29)

Karakter menurut Depdiknas adalah “bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat temperamen, dan watak” (Sudrajat; 2010). Jadi, yang disebut berkarakter sebenarnya adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak.

Seorang Filosof Yunani, Heraclitus (dalam Lickona, 2012:12) mengatakan bahwa “Karakter adalah takdir”. Karakter akan membentuk takdir seseorang. Hal tersebut juga diuraikan dalam kutipan kalimat pada buku (Lickona, 2012:11), yaitu : Hati-hati terhadap pikiran Anda, pikiran Anda menjadi kata-kata Anda. Hati-hati dengan kata-kata Anda, kata-kata Anda menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan perbuatan Anda, perbuatan Anda menjadi kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Hati-hati dengan karakter Anda, karakter Anda menjadi takdir Anda. Pendapat Heraclitus dan kutipan kalimat di atas, jelas menunjukkan bahwa karakter terbentuk melalui suatu proses dan merupakan hal urgen yang akan sangat mempengaruhi masa depan kehidupan seseorang.

Peran Guru dalam menerapkan penguatan karakter adalah suatu kegiatan yang mengharuskan guru dalam membimbing dan membina karakter siswa ke hal yang baik, seringkali terjadi dalam sekolah guru tidak menghiraukan karakter siswanya padahal tugas sebagai seorang guru itu adalah memperhatikan siswanya baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam tingkaha laku siswa dalam sekolah,

Hasil Observasi awal di lingkungan sekolah SMA Swasta Permata kasih bahwa masih sering melihat peristiwa anak-anak sekolah membuang sampah sembarangan, tidak mengerti cara mengantri, bersikap acuh tak acuh, bahkan kurang hormat terhadap orangtua dan guru, kurangnya sensitivitas, dan perkelahian antar pelajar, perundungan, bahkan juga sikap-sikap intoleran di sekolah. Perubahan perilaku zaman milenial yang mengarah pada gejala berkurangnya sosialisai dan interaksi antar individu secara langsung mereka sibuk dengan main *handphone* dan memiliki rasa acuh tak acuh terhadap

sesama siswa, serta adanya kecenderungan menginginkan segala hal secara instan, padahal segala sesuatu bisa dicapai hanya melalui proses, yaitu melakukan kerja keras, disiplin, fokus, dan penuh kesabaran serta tidak mudah menyerah.

Berdasarkan uraian persoalan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Karakter Siswa Di SMA Swasta Permata Kasih”.

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengamati dan mengungkap permasalahan tentang peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam Penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian, maka penelitian merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih.
2. Apa saja kendala yang dihadapi guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih.
3. Apa saja upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyelesaikan kendala untuk penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru PKn dalam penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru PKn dalam menyelesaikan kendala penguatan karakter siswa di SMA Swasta Permata Kasih.

1.5 Manfaat Penelitian

Soekidjo (2010:19), berikut ini adalah dua jenis manfaat penelitian yang harus di cantumkan di dalam penelitian tersebut yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat menambah khasanah teori khususnya peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Bagi sekolah, dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa
- 2) Bagi guru PPKn, dapat memberikan sumber informasi serta referensi tambahan pengetahuan bagi guru dalam mengembangkan peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa
- 3) Bagi peneliti, dapat memperoleh dan menambah ilmu tentang peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter siswa
- 4) Bagi Universitas Nias semoga temuan penelitian ini dapat memperkuat kerjasama dengan sekolah mitra dalam mengembangkan nilai-nilai karakter.